

Pemilu 2014: Politisi Pencari Kursi di Senayan

Fathur Rahman, Irma Fitriana Ulfah, Oscar Radyan Danar
Universitas Brawijaya Malang
Email: fathur_rahman@ub.ac.id

Abstract

General Elections can be used as evidence as well as evaluation of the recruitment process, political circulation. This paper proves that in the 2014 Election there has been a stagnation in political circulation. As well as, the 2014 elections, where many candidates for people's representatives are still filled by old politicians. After becoming a member of the House of Representatives for a long time, he became a member of the DPD, and vice versa. As a result, there is still a strong intervention by political parties in placing their cadres. As a result, there is often political decay like corruption.

Keywords: Elections, Politician, Seeker, Position

Abstrak

Pemilihan Umum dapat dijadikan pembuktian sekaligus evaluasi bagi proses rekrutmen, sirkulasi politik. Tulisan ini membuktikan bahwa dalam Pemilu 2014 telah terjadi stagnasi dalam sirkulasi politik. Begitu dengan Pemilu tahun 2014, dimana banyak calon wakil rakyat masih diisi oleh politisi lama. Setelah lama menjadi anggota DPR kemudian menjadi anggota DPD, begitu sebaliknya. Untuk mencari alasan mengapa demikian maka teknik penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka, dokumentasi. Hasilnya, masih kuatnya campur tangan partai politik dalam menempatkan kader-kadernya. Akibatnya, sering terjadi pembusukan politik seperti korupsi.

Kata kunci: Pemilu, Politisi, Pencari, Kursi

PENDAHULUAN

Delapan bulan sebelum Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya merilis Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten, DPRD Kotamadya, DPRD Provinsi, DPR Republik Indonesia. KPU memuplikasikan DCS, DCT Republik Indonesia untuk Pemilu tahun 2014 serentak secara nasional. Setiap media cetak maupun *on line* menyediakan liputan khusus terkait Pemilu tahun 2014. Yang menarik, setelah dicermati ternyata terdapat banyak nama yang sudah tidak asing lagi. Namanya tetap muncul lagi meski sudah satu dekade menjadi anggota parlemen tersebut. Selain itu, banyak calon anggota DPR RI untuk Pemilu tahun 2014 merupakan mantan anggota DPD RI hasil Pemilu tahun 2004 dan 2009. Hal ini bisa dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel: 1
Calon anggota DPR RI 2014-2019

No	Nama	Asal	Posisi Awal
1.	La Ode Ida	Partai Amanat Nasional (PAN)	Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	Dani Anwar	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta
3.	Aida Zulaikha N. Ismeth	Partai Demokrat	Anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau
4.	Supartono	Partai Golongan Karya	Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur
5.	Andika Hazrumy	Partai Golongan Karya	Anggota DPD RI Provinsi Banten

Sumber: hasil olahan penulis, Oktober 2018

Kemudian, selain Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang dipublikasikan, KPU juga mempublikasikan DCT Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Pemilu Tahun 2014. Tidak ada keanehan setelah membaca satu demi satu nama calon anggota senat dari setiap provinsi. Nama-nama yang tercantum di Daftar Calon Tetap (DCT) DPD RI Pemilu Tahun 2014 merupakan petahana DPD RI dari Pemilu 2009. Selain itu, banyak mantan anggota DPR RI hasil Pemilu Tahun 2004 dan 2009 yang mencoba peruntungan pada Pemilu Tahun 2014 sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.

Begitu banyaknya peminat, termasuk para mantan anggota DPR RI seperti yang terlihat pada Tabel 2 di atas dan banyaknya mantan kepala daerah seperti terlihat pada Tabel 3 menggambarkan bahwa kursi DPD RI masih banyak dilirik atau terlihat “seksi”. Meskipun *keberadaan* lembaga DPD RI masih dipertanyakan sampai sekarang karena terjadi tarik-menarik beragam kepentingan (*interest*) dan kewenangan dengan DPR RI dimana posisinya sebagai “saudara tua”.

Tabel: 2
Calon Anggota DPD RI 2014-2019

No	Nama	Asal	Periode	Wilayah
1.	Akhmad Muqowam	PPP	2004-2009, 2009-2014	Jawa Tengah
2.	Soemaryoto	PDIP	2004-2009, 2009-2014	Jawa Tengah
3.	Toto Dirgantoro	Golkar	2004-2009, 2009-2014	Jawa Tengah
4.	Sidarto Danusubroto	(PDIP)	2004-2009, 2009-2014	DI Yogyakarta
5.	Gondo Radityo Gam-biro	Partai Demokrat	2004-2009, 2009-2014	Banten

Sumber: Hasil olahan penulis, Oktober 2018

Amandemen UUD 1945 memang tidak menempatkan DPD RI setara dengan DPR RI. Walaupun dipilih oleh rakyat secara langsung. Kewenangan DPD RI masih terbatas. Penempatan kata *dapat* dalam Pasal 22c dan 22d UUD 1945 telah menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewenangan DPR RI dan DPD RI.¹ Ada hak untuk mengusulkan dan mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah namun DPD RI tidak berwenang memutuskan RUU bersama DPR RI. Berdasarkan komposisi, keanggotaan DPD RI diwakili merata empat orang di setiap provinsi. Dengan demikian keanggotaan DPD RI tidak didominasi oleh wakil dari Pulau Jawa saja. Total anggota DPD RI dari Pulau Jawa dimana terdiri dari enam provinsi hanya berjumlah 24 orang atau 17,6 persen dari total anggota DPD RI dari 34 provinsi yang berjumlah 134 orang.²

¹ Lihat Pasal 22c dan 22d UUD 1945.

² Hasil Litbang *Kompas*, 3 Februari 2014, hlm. 5.

Tabel: 3
Calon anggota DPD RI 2014-2019

No	Nama Calon Anggota DPD 2014-2019	Latar Belakang Partai Politik	Pososi Awal	Provinsi
1.	Hendro Martojo	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bupati Kabupaten Jepara 2002-2007, 2007-2012	Jawa Tengah
2.	Herry Herman-syah Silondae	Partai Golongan Karya (Golkar)	Bupati Kabupaten Konawe Utara 2005-2010	Sulawesi Tenggara
3.	Nu'man Abdul Hakim	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Wakil Gubernur Jawa Barat	Jawa Barat
4.	Hudarni Rani	Partai Golongan Karya (Golkar)	Gubernur Bangka Belitung 2002-2007	Bangka Belitung
5.	Badrul Munir	Partai Golongan Karya (Golkar)	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2008-2013	Nusa Tenggara Barat
6.	Ibrahim Agustinus Medah	Partai Golongan Karya (Golkar)	Bupati Kabupaten Kupang 1999-2004, 2004-2009	Nusa Tenggara Timur

Sumber: Hasil olahan penulis, Oktober 2018

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi pustaka melalui pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana proses sirkulasi elit politik dalam Pemilu tahun 2014. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan peristiwa yang operasionalisasinya tentang pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data. Data didapat dari buku-buku tentang pemilu, jurnal tentang partai politik, koran nasional, media daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 yang lalu, bagi para petahana yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPD RI bisa jadi bukan puncak karir politiknya. Karena banyak politisi yang bakal duduk kembali ke “gedung senayan” hanya dengan

jalur yang sama. Awalnya sebagai anggota DPR RI kemudian menjadi anggota DPD RI, begitu sebaliknya. Berdasarkan data penelitian dari *Formappi*, Februari 2013 bahwa ada 9 persen petahana DPR RI periode 2009-2014 yang dicalonkan lagi oleh pimpinan partainya untuk periode 2014-2019.

Kemudian, ada petahana dari DPD RI dan DPR RI yang mencalonkan kembali melalui jalur pemilihan anggota Senat atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau begitu sebaliknya. Sebut saja, Akhmad Muqowam, Politisi Senior dari PPP ikut berkontestasi dalam pemilihan anggota DPD RI. Politisi ini ingin menyelamatkan karir politiknya setelah tersingkir dalam pemilihan Ketua Umum PPP pada Muktamar PPP IV pada Tahun 2011 lalu. Akhmad Muqowam dikalahkan oleh Surya Darma Ali. Keberuntungan telah diperoleh oleh Akhmad Muqowam karena terpilih menjadi Anggota dan Wakil Ketua IV DPD RI 2014-2019. Cerita yang sama juga dengan Gede Pasek Suardika. Mantan politisi Partai Demokrat ini bertarung memperebutkan anggota DPD RI dari Provinsi Bali. Gede Pasek Suardika berkompetisi dengan 40 orang calon anggota DPD RI dari Provinsi Bali. Alasan Gede Pasek Suardika maju karena untuk menyelamatkan karir politik setelah tersingkir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada Maret 2013. Mantan Politisi Partai Demokrat ini merupakan teman dekat Anas Urbaningrum karena mereka sama-sama aktif di dunia gerakan mahasiswa. Gede Pasek Suardika semakin bulat untuk bertarung dalam pemilihan anggota DPD RI 2014 karena jenuh dengan kondisi internal Partai Demokrat. Selain itu, Gede Pasek Suardika dianggap merongrong kelembagaan Partai Demokrat, karena menjadi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).³

Sedangkan untuk Soernaryoto, Toto Dirgantoro merupakan anggota DPR RI hasil Pemilu 2004 dan 2009. Kedua politisi *Senayan* ini maju dalam kontestasi DPD RI di Tahun 2014 karena sebelumnya “turun gunung” ke Jawa Tengah untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meskipun akhirnya kalah. Soernaryoto maju dalam Pilkada sebagai calon bupati Kabupaten Karanganyar sedangkan Toto Dirgantoro maju dalam Pilkada sebagai calon bupati Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Begitu juga dengan, Gondo Radityo Gambiro merupakan anggota DPR RI 2009-2014 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I. Gondo Radityo Gambiro duduk

³ PPI merupakan organisasi masyarakat bentukan Anas Urbaningrum dan teman-temannya termasuk Gede Pasek Suardika, pasca Anas Urbaningrum tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

sebagai Wakil Ketua Komisi VIII Bidang Sosial, Perempuan dan Anak. Selain itu, dalam struktur kepengurusan partai, dia sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Partai Demokrat Jawa Timur. Namun akhirnya dia harus memutuskan bertarung dengan tidak menggunakan jalur Partai Demokrat lagi agar bisa kembali ke Gedung Senayan. Ada tiga alasan mengapa jalur DPD RI dari Provinsi Banten dia tempuh antara lain, *Pertama*, dia mau berkonsentrasi mengurus ormas, Garansi. Organisasi masyarakat inilah yang menjadikan Gondo Radityo Gambiro sebagai anggota legislatif peraih suara terbanyak kedua dari Dapil Jawa Timur I pada Pemilu Tahun 2009 lalu. *Kedua*, kalah bersaing dengan calon anggota legislatif (caleg) yang memperebutkan kursi dari Dapil I Provinsi Jawa Timur. *Ketiga*, Gondo Radityo Gambiro merasa ditekan oleh partainya karena diduga melakukan penyimpangan dana bencana alam di Tasikmalaya Jawa Barat.⁴

Lain ceritanya dengan Mantan Ajudan Presiden Soekarno (Presiden RI Pertama) yaitu Sidharto Danusubroto yang ikut bertarung dalam pemilihan anggota DPD RI 2014-2019 dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sidharto Danusubroto memilih jalur DPD RI setelah menjadi anggota DPR RI selama 25 tahun atau lima periode. Namun untuk kembali ke *Senayan* tidaklah mudah bagi politisi Senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini. Dia bersaing ketat dengan tiga orang petahana DPD RI 2009-2014 dan kader PDI-P sendiri yaitu Bambang Eko Prabowo. Bambang Eko Prabowo merupakan anggota DPRD Provinsi DIY saat 2009-2014. Salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh Ketua MPR RI 2013-2014 ini agar terpilih sebagai anggota DPD RI pada Pemilu 2014 nanti dengan mengoptimalkan mesin (Dewan Pimpinan Daerah) DPD PDI-P DIY.

Sedangkan untuk para petahana DPD RI dalam Pemilu Tahun 2014 dari Provinsi DIY ini yaitu *Pertama*, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. GKR Hemas bukan orang asing bagi warga Provinsi DIY karena beliau merupakan isteri Sultan Hamengku Buwono X. *Kedua*, Cholid Mahmud merupakan politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi DIY 2004-2009. *Ketiga*, Afnan Hadikusumo merupakan kader aktif dalam Kepengurusan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan mantan anggota DPRD Provinsi DIY 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional. Strategi yang digunakan oleh kedua orang petahana DPD RI ini

⁴ Lihat *Beritasatu.com* Tanggal 11 April 2013.

akan mengoptimalkan jejaring partai politiknya masing-masing untuk mendukungnya kembali ke Gedung *Senayan*.

Keempat, Hafidz Asrom juga petahana yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Dia merupakan seorang pengusaha terkenal di Provinsi DIY dan kader Nahdhatul Ulama (NU). Bahkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DIY memasang tiga calon anggota DPD RI lainnya yaitu Taufiqurrohman, Fairuz Ahmad dan KH. Abdul Muhaimin. Taufiqurohman merupakan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta, Fairuz Ahmad saat sebagai Ketua Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Anshor Provinsi DIY. Maka ada persaingan kompetitif terjadi diantara keempat calon anggota DPD RI.

Terakhir ada yang berbeda ketika mencermati sirkulasi politik pada Tabel 1 di atas. Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Ida memilih kendaraan politiknya dengan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Senator ini, La Ode Ida ikut bertarung menjadi calon anggota legislatif DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Tenggara setelah menjadi anggota DPD RI selama dua periode, sejak Tahun 2004. Sedangkan untuk ketiga mantan anggota DPD RI 2009-2014 yaitu Dani Anwar, Muhammadi Gazali, dan Supartono memutuskan pencarian peruntungan agar bisa terpilih ke *Senayan* kembali melalui kendaraan partai politik. Motivasi mereka “nye-brang” ke jalur partai politik bisa dikarenakan beberapa penyebab antara lain: *Pertama*, ketiga calon ini merasa memiliki pendukung yang setia dari hasil Pemilu Tahun 2009 yang lalu. Massa pendukung masih terjaga karena mereka selalu merawatnya ketika menjadi anggota senat. Kemudian masa pendukung yang hasil perolehan Pilkada bida dialihkan untuk memilihnya melalui jalur partai politik. Hal yang sama juga menjadi salah satu strategi dari Aida Zulaikha Ismet. Massa pendukung ketika memperebutkan kursi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bisa dijadikan suara pemilihnya. Pilkada merupakan barometer karir politiknya. *Kedua*, ketiga calon anggota DPR RI ini merasa bahwa “iklim politik” di *Senayan* bukan merupakan hal yang aneh. Sehingga jika terpilih untuk maju dan lolos ke *Senayan* setidaknya sudah memiliki modal politik. *Ketiga*, mereka merasa posisi sebagai senat masih belum bisa maksimal.

Antara DPR dan DPD

Belum optimalnya institusi DPD RI secara kelembagaan dikarenakan oleh dua hal antara lain. *Pertama*, berdasarkan dari sudut jumlah, DPD sudah dibatasi di dalam

konstitusi bahwa jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. Jadi, penentuan kuorum ketika ada sidang di MPR juga tidak berkorelasi dengan posisi DPD RI. *Kedua*, kalau dilihat berdasarkan dimensi fungsi maka DPD hanya sekadar kolegislator.⁵ DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan urusan daerah, otonomi daerah. DPD juga ikut membahasnya tapi tidak dapat ikut dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dengan kondisi yang terbatas tersebut, DPD RI masih bisa mengoptimalkan perannya dalam sisi legislasi, anggaran (*budgeting*), dan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan.

Memahami Teorisasi Kekuasaan

Kekuasaan dalam pandangan para politisi bisa jadi memiliki daya magnet. Dimana ada kekuatan sehingga tidak mudah untuk melepaskannya. Daya lekatnya begitu kuat. Hal itu tergambar dari para politisi Senayan tidak melepaskan begitu saja kekuasaannya. Demi memudahkan kembali pada Senayan, mereka berpindah *kamar* saja. Awalnya duduk sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode kemudian pindah menjadi anggota DPD RI dan begitu sebaliknya.

Begitu pula, kalau berdiskusi tentang kekuasaan (*power*) memiliki posisi sentral dalam khasanah Ilmu Politik. Membicarakan tentang Ilmu Politik maka secara otomatis membicarakan tentang kekuasaan. Siapa, bagaimana dan mendapat apa. Dalam hal ini ada hukum pertukaran sebagaimana dalam kaidah urusan industrial. Ada pertukaran baik lokasi, posisi maupun materi. Dulu sebagai anggota DPR RI maka sekarang menjadi anggota DPD RI, begitu sebaliknya. Ada kesan bahwa politisi yang melakukan pertukaran posisi tidak mau melepaskan begitu saja kekuasaannya. Menurut Friedrich Nietzsche, nafsu untuk berkuasa merupakan naluri alamiah manusia. Kekuasaan disini tentu saja tidak terbatas pada tafsir kekuasaan politis namun pada spektrum yang luas. Kehendak untuk berkuasa menjadi akar semua perilaku destruktif manusia. Perang, intrik politik, penindasan, dan korupsi terjadi karena hawa nafsu manusia untuk berkuasa. Pepatah dari Lord Acton: “ kekuasaan cenderung korup” sangat terbukti. Lebih-lebih melihat kondisi di Indonesia saat ini. Kehendak berkuasa berkorelasi dengan korupsi. Orang-orang beramai-ramai memperebutkan kursi DPR RI, DPD RI. Namun ujung-ujungnya banyak oknum anggota DPR RI mencari uang dengan melakukan korupsi.

⁵ Kompas, 3 Februari 2014, Lihat halaman 5.

Pada sisi yang lain, korupsi bisa dipahami sebagai manifestasi nyata dari sifat ekonomis manusia. Seorang filsuf dari Perancis, Marquis de Sade berucap bahwa tujuan hidup manusia tidak lepas dari keinginan mencari kenikmatan semaksimal mungkin. Dengan demikian, kekuasaan yang koruptif bisa dihilangkan melalui sirkulasi elit yang selektif.

Sirkulasi Elit

Ketika mencermati kondisi suatu masyarakat maka ada dua kelompok yaitu kelompok elit dan kelompok non elit.⁶ Adapun maksudnya bahwa individu yang berkedudukan sebagai elit tidak selamanya individu tersebut akan menduduki posisinya. Posisi yang mereka duduki tidak akan lestari atau langgeng karena akan digeser, diganti oleh yang lain. Begitu pula dengan yang dialami oleh Akhmad Muqowam dari PPP. Posisi dua orang politisi PPP ini telah tergeser terutama Akhmad Muqowam yang kalah dalam perebutan kursi ketua umum PPP pada Muktamar IV PPP pada tahun 2011 lalu. Akhmad Muqowam kalah oleh Surya Darma Ali, ketua umum PPP saat ini. Nasib yang sama dialami oleh Gede Pasek Suardika. Karena merupakan orang dekat atau loyalis Anas Urbaningrum maka Gede Pasek Suardika tergeser oleh Jero Wacik dalam pencalonan anggota DPR RI dari Provinsi Bali. Jero Wacik merupakan orang dekat, loyalis dari kubu SBY. Oleh karena itu, tidak aneh dalam sirkulasi elit dalam sebuah partai politik muncul istilah *the winner takes all*.

Sirkulasi elit merupakan keniscayaan. Perubahan, pergeseran elit dalam sebuah masyarakat, partai politik, lembaga-lembaga negara tidak dapat dihindari. Tidak ada kekuatan apa pun yang mampu menghalau terjadinya perubahan, begitu juga dengan sirkulasi elit. Fungsi pemilihan umum salah satunya adalah mendorong terjadinya sirkulasi elit. Pemilu dapat diartikan sebagai instrumen migrasi vertikal dan horizontal. Pemilu merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Pintu masuk bagi terjadinya sirkulasi elit dalam Pemilu adalah melalui tahap seleksi kandidat. Proses kandidasi merupakan sarana seleksi pertama yang dilakukan oleh partai sebagai proses kontestasi jabatan publik.⁷ Dengan seleksi kandidat itu dapat dilihat apakah sirkulasi elit

⁶ Haryanto, *Kekuasaan Elit: Suatu bahasan Pengantar*, Diterbitkan oleh Program Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL, 2005, hlm. 87.

⁷ Lihat Richard S. Kartz. *The Problem of candidate selection and Models of Political Party Democracy* dalam *Journal of Party Politics* Volume 7 Nomor 3, 2001, hlm. 277.

berpedoman pada proses dimana individu-individu berputar di antara elit dan non-elit atau mengacu pada proses dimana elit satu digantikan oleh elit yang lain.⁸ Cepat atau lambat pihak yang selama ini mengendalikan kekuasaan pasti tergeser oleh kelompok lain. Tingkat rivalitas sangat ketat. Dengan demikian, akhir dari Pemilu itu berdasarkan sirkulasi elit adalah terpilihnya wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Jangan sampai Pemilu Tahun 2019 nanti persis dengan yang pernah dijelaskan oleh Prezeworski dan rekan-rekannya bahwa hanya rezim yang menyelenggarakan Pemilu untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan.⁹

Sejumlah partai politik besar memang telah menyusun pedoman rekrutmen calon (penjaringan, penyaringan, dan penetapan dalam daftar berikut nomor urutnya) tetapi sekelompok elit partai begitu dominan dan berpengaruh dalam menentukan nominasi.¹⁰ Pola seperti ini menunjukkan telah berlaku hukum besi oligarki dalam sebuah partai politik dimana ada kekuatan besar yang dapat menentukan kader-kadernya untuk berada di posisi lembaga pemerintahan.

Pembusukan Politik

Dalam kaidah demokrasi prosedural, Pemilu merupakan arena persaingan dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal warganegara yang telah memenuhi syarat.¹¹ Pemilu tahun 2014, menurut Muhtar Haboddin bahwa Pemilu tahun 2014 merupakan ajang pembuktian bagi politisi dan elit pemerintahan di hadapan pemilihnya.¹² Maka lembaga monitoring korupsi, *Indonesia Corruption Watch*, Oktober 2013 merilis, sejak semester II-2012 hingga semester II-2013 saja, tercatat sudah 81 anggota DPR yang terjerat korupsi. Data dari Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah anggota DPRD provinsi yang terjerat kasus hukum sudah 431 orang dengan 83,7 persen dari jumlah itu adalah kasus korupsi.¹³ Kasus korupsi tidak

⁸ TB Bottomore, *Elit dan Kelas Sosial*, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2006.

⁹ Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 9.

¹⁰ Syamsudin Haris (ed), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai-Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia, 2005.

¹¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah mada Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

¹² Muhtar Haboddin, 2016, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Malang, UB Press, hlm. 93.

¹³ *Kompas*, 16 Desember 2013.

hanya terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah melainkan sudah masuk dalam tingkat pemerintahan desa.¹⁴

Pada tingkatan eksekutif, mulai dari bupati atau wali kota, gubernur, sampai menteri, banyak juga yang menjadi tersangka dalam perkara korupsi, bahkan sudah menjadi terpidana. Sementara di lembaga yudikatif kasus tertangkap tangannya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi puncak dari ironi di negeri ini. Berdasarkan apa yang telah terjadi pada tahun 2013, dan 2018, harapan tertanam pada tahun 2014 dan 2019. Hal ini sesuai dengan pemikiran Lance Castles yang menyatakan bapemilu yang demokratis adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elit dapat dilaksanakan secara damai dan demokratis.¹⁵ Inilah saatnya bagi seluruh rakyat untuk kembali memilih siapa yang layak dan tidak layak menjadi wakil rakyat dan juga memimpin negeri ini.

Pemilu legislatif (Pileg) yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 menjadi momentum pertama. Kini, ratusan ribu orang telah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dari ratusan ribu calon legislator itu, untuk Pemilu tahun 2014, harus terpilih 560 anggota DPR yang berkualitas dan berintegritas. Begitu juga dengan 77 DPD ataupun 2.137 DPRD provinsi serta 17.560 DPRD kabupaten/kota. Sedangkan untuk tahun 2019, KPU telah menetapkan DCT anggota DPR RI sejumlah 7.968 orang untuk Pemilu 2019.¹⁶ Hasil pemilu legislatif ini juga akan menentukan partai politik mana yang bisa mengajukan calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu Presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang dapat mengajukan capres atau cawapres.

Setelah calon presiden dan calon wakil presiden yang memenuhi syarat ditetapkan KPU, rakyat kembali harus menyeleksi, siapa yang benar-benar menjadikan kedudukan untuk

¹⁴ Fathur Rahman, dkk. 2018, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur), *Jurnal Integritas*, Vol. 4 No. 1, Diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hlm. 29.

¹⁵ Lance Castles, 2004, *Pemilu 2004 dalam konteks Komparatif Historis*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁶ *Kompas*, 20 September 2018.

memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat dan mana yang hanya menjadikan kedudukan sebagai alat berkuasa semata.

KESIMPULAN

Proses Pemilu tahun 2004 telah terlewati, tapi sirkulasi elit masih bersifat eksklusif. Partai politik hanya sebatas “pabrik” masing mengutamakan sisi kepentingannya sendiri dibanding mengutamakan kepentingan masyarakat. Sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan-pilihan yang terbaik dalam Pemilu 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bottomore, TB, (2006) *Elit dan Kelas Sosial*, Akbar Tandjung Institute, Jakarta.
- Castles, Lance, 2004, *Pemilu 2004 dalam konteks Komparatif Historis*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Diamond, Larry, (2003), *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta.
- Haboddin, Muhtar, 2016, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Malang, UB Press.
- Haris, Syamsuddin (ed), (2005), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai-Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia, 2005
- Haryanto, (2005), *Kekuasaan Elit: Suatu bahasan Pengantar*, Diterbitkan oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Pamungkas, Sigit, (2009), *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Jurnal:

- Kartz, Richard S, (2001), The Problem of candidate selection and Models of Political Party Democracy dalam *Journal of Party Politics* Volume 7 Nomor 3.
- Rahman, Fathur, dkk, 2018, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur), *Jurnal Intergritas*, Vol. 4 No. 1, Diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Koran:

Kompas, 3 Februari 2014, hlm. 5.

Beritasatu.com Tanggal 11 April 2013.